

STRATEGI TATA KELOLA DATA SDM POLRI

Dalam Mendukung

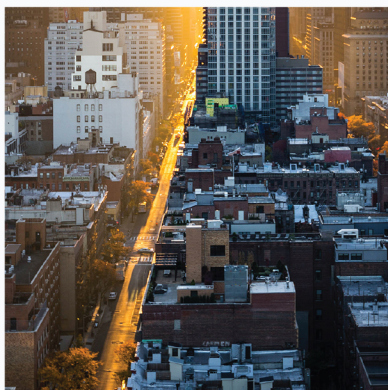
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA POLRI

DISUSUN OLEH :

NAMA : Afrinny Roesmawaty, S.Si., M.A.

NDH : 002

INSTANSI : Kepolisian Negara Republik Indonesia



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



STRATEGI TATA KELOLA DATA SDM POLRI DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA POLRI

DISUSUN OLEH

NAMA : **Afrinny Roesmawaty, S.Si., M.A.**
NDH : 002
INSTANSI : Kepolisian Negara Republik Indonesia

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta : Afrinny Roesmawaty., S.Si., M.A.
NDH : 002
Jabatan : Kaurmin Baginfopers Robinkar SSDM Polri
Instansi : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa Proyek Perubahan berjudul:

STRATEGI TATA KELOLA DATA PERSONEL POLRI DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA POLRI

adalah karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Proyek Perubahan ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Jakarta, November 2023

AFRINNY ROESMAWATY, S.Si., M.A.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Peserta : AFRINNY ROESMAWATY., S.Si., M.A.
NDH : 002
Jabatan : Kaurmin Baginfopers Robinkar SSDM Polri
Instansi : Kepolisian Negara Republik Indonesia
Judul Proyek Perubahan : **Strategi Tata Kelola Data Personel Polri
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan
Satu Data Polri**

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Implementasi Proyek
Perubahan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 November
2023

Bandung, November 2023

Mentor,

Coach,

M. AGUS FAJAR H, S.I.K., M.Si.

Dr. Ir. RETNO SETIJOWATI, M.Si.

DAFTAR ISI

1

BAB I RENCANA PROYEK PERUBAHAN

1. LATAR BELAKANG
2. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN
3. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
4. PETA STAKEHOLDER
5. MILESTONE RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

11

BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
2. KEPEMIMPINAN STRATEGIS
3. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING
 - A. Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasinya
 - B. Pemanfaatan Strategi Organisasi
 - C. Strategi Marketing
4. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN
5. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR
6. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN
7. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

39

BAB III PENUTUP

1. KESIMPULAN
2. REKOMENDASI
3. LESSON LEARNT

ABSTRAK

Hadirnya proyek perubahan ini berawal dari gagasan untuk menjawab kebutuhan akan ketersediaan data personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang lengkap, valid, dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Polri. Sejalan dengan implementasi digitalisasi pemerintahan sesuai arahan Presiden berupa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga hal ini kemudian menjadikan kebutuhan bagipakai data di lingkungan Polri semakin hari semakin meningkat.

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi SSDM Polri yang merupakan pembina fungsi manajemen sumber daya manusia Polri, sesuai kebijakan Satu Data Polri melalui Perkap Nomor 4 Tahun 2021, untuk menghadirkan data yang berkualitas dan dapat dibagipakaikan antar satuan kerja maupun antar kementerian/Lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Informasi Personel.

Implementasi Proyek Perubahan dengan program **SIPP untuk Satu Data** yang merupaka **Strategi Pengelolaan Data Personel Polri Dalam Mendukung Kebijakan Satu Data Polri** pada jangka pendek telah menghasilkan produk: 1) Draft Revisi Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Personel Polri; 2) Draft Keputusan As SDM Kapolri tentang Tata Kelola Integrasi Data Personel di Lingkungan SSDM Polri; 3) Program validasi data personel Polri melalui SIPP; 4) Kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal di lingkungan SSDM Polri yaitu dengan Bagmutjab dan Bagpangkat dan 5) Kerjasama bagipakai data dengan stakeholder eksternal BPJS.

Keberlanjutan program SIPP untuk Satu Data ini di jangka menengah dan jangka panjang telah mendapat dukungan dari mentor dan pimpinan Satker untuk dikembangkan dan dilanjutkan dengan cakupan yang lebih luas lagi untuk seluruh Biro dan Bagian yang ada di SSDM Polri di tahun 2024 melalui dukungan anggaran Program **Sistem Master Data Manajemen Enterprise pada Satker SSDM Polri** sebagai embrio untuk membangun dan mewujudkan **Satu Data SDM**.



BAB I

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Data, belakangan banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti aparaturnya pemerintahan, masyarakat, bisnis, penegak hukum, dan juga masyarakat sipil. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, karena data yang kredibel merupakan kunci dari kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sayangnya, dalam praktiknya data masih sering tidak dikelola secara serius. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya.

Seiring dengan proses implementasi kebijakan Satu Data Polri oleh seluruh Satker di lingkungan Polri, Web Portal Satu Data Polri juga ditargetkan akan segera rampung dan dapat digunakan pada akhir tahun 2023. Proses konsolidasi penyelenggara data di lingkungan Polri terus dilakukan, terutama bagi Satker yang menjadi penanggung jawab sebagai penyedia Data Prioritas Satu Data Indonesia.

Salah satu Satker tersebut adalah Satker Staf Sumber Daya Manusia (SSDM). SSDM Polri merupakan penanggung jawab penyedia dua data prioritas, yakni: 1) Data jumlah polisi berdasarkan kategori pangkat dan jenis kelamin, dan 2) Data jumlah polisi yang ditugaskan pada Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

B. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan proyek perubahan ini dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan):

Tujuan
a. Tersusunnya Revisi Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Personel Polri.
b. Tersusunnya Keputusan As SDM Kapolri tentang Tata Kelola Integrasi Data Personel di Lingkungan SSDM Polri.
c. Terlaksananya program validasi data personel pada pada Sistem Informasi Personel Polri dengan pemanfaatan data NIK yang terintegrasi dengan data NRP.
d. Optimalisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal (Bagmutjab dan Bagpangkat)
e. Optimalisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder eksternal (BPJS)

Output

- a. Tersedianya rujukan peraturan dalam pengelolaan data personel Polri bagi Satker Mabes dan Polda.
- b. Tersedianya rujukan peraturan dalam melaksanakan bagipakai data bagi Bagian yang ada di lingkungan SSDM.
- c. Tersedianya data personel yang lengkap dan berkualitas.
- f. Stakeholder internal dapat menerima manfaat dan memberikan dukungan yang optimal dalam pengelolaan data personel. (Bagmutjab dan Bagpangkat)
- d. Stakeholder internal dapat menerima manfaat dan memberikan dukungan yang optimal dalam pengelolaan data personel (BPJS).

2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan sampai 1 tahun):

Tujuan

- a. Tersusunnya Keputusan Kapolri tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dalam Pengelolaan Data Personel.
- b. Pengembangan kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal yaitu:
 - Bagian Penyediaan Personel Rodalpers SSDM Polri, update data penempatan pertama perwira pertama Polri melalui aplikasi e-Patma.
 - Bagian Penerimaan dan Pendidikan PNS Rodalpers SSDM Polri, update data penempatan pertama PNS Polri melalui aplikasi e-SIAP.
- c. Pengembangan kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder eksternal yaitu:
 - BP Tapera, untuk data kepesertaan Tapera.
 - Asabri, untuk data kepesertaan Asabri.

Output

- a. Tersedianya rujukan peraturan dalam pemanfaatan data NIK sebagai secondary key dalam Sistem Informasi Personel Polri.
- b. Terlaksananya *update* data penempatan pertama Pama, Bintara dan PNS Polri dengan tepat waktu secara otomatis dan tersistem.
- c. Terwujudnya pemadanan data kepesertaan Tapera bagi PNS Polri untuk percepatan terlaksananya pengadaan perumahan.

Outcome

- a. Operator SIPP tingkat Satker Mabes dan Polda memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur dan mekanisme pemanfaatan NIK dalam pengelolaan data personel.
- b. Satker dan Polda dapat dengan cepat mempersiapkan data administrasi lanjutan bagi personel baru Polri melalui sistem.
- c. Status kepesertaan PNS Polri pada Tapera dapat dilakukan percepatan.

3. Tujuan Jangka Panjang (1 tahun sampai 2 tahun)

Tujuan
<ul style="list-style-type: none">a. Pengembangan fitur pada Sistem Informasi Personel Polri.b. Tersedianya anggaran yang memadai pemeliharaan untuk Sistem Informasi Personel Polri.c. Terlaksananya Anev berkelanjutan dalam tata kelola integrasi data personel di lingkungan SSDM Polri.
Output
<ul style="list-style-type: none">a. Sistem Informasi Personel Polri dapat menjadi aplikasi penyediaan data personel yang <i>up to date</i>.b. Pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan cepat sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi.c. Dapat teridentifikasi kekurangan dan kendala yang ada untuk merencanakan perbaikan.
Outcome
<ul style="list-style-type: none">a. Tersedianya data personel Polri yang berkualitas yang mudah diakses dan digunakan melalui Portal Satu Data Polri.b. Tersedianya <i>Big Data</i> SDM Polri yang handal.c. Integrasi data dan pemanfaatan data personel di lingkungan Polri berjalan dengan baik.

C. Manfaat Proyek Perubahan

Manfaat dari proyek perubahan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Manfaat Internal

- a. Tersedianya rujukan peraturan dalam pengelolaan data personel Polri bagi Satker Mabes dan Polda
- b. Tersedianya rujukan peraturan dalam pemanfaatan data NIK sebagai secondary key dalam Sistem Informasi Personel Polri.
- c. SSDM Polri mampu menjadi penyedia data personel Polri yang berkualitas bagi para pengguna yang membutuhkan dalam mendukung program Satu Data Polri.
- d. Terwujudnya tata kelola data personel yang baik di lingkungan SSDM Polri.
- e. Operator SIPP tingkat Satker Mabes dan Polda memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur dan mekanisme pengelolaan data personel.
- f. Meningkatnya kepuasan personel Polri dalam pelayanan hak-hak kepesertaan BPJS, Asabri dan Tapera.

2. Manfaat Eksternal

- a. Terwujudnya kerjasama yang baik antara SSDM Polri dengan BPJS, Asabri dan Tapera.
- b. Terwujudnya pelayanan hak kepesertaan BPJS Kesehatan yang lebih baik dan efisien bagi personel beserta anggota keluarga.
- c. Terwujudnya pelayanan hak kepesertaan Asabri yang lebih baik dan efisien bagi personel Polri yang telah purna tugas dan meninggal dunia.
- d. Terwujudnya pelayanan hak kepesertaan Tapera yang lebih baik dan efisien bagi personel Polri yang ingin mengajukan biaya kepemilikan perumahan.
- e. Tersedianya data personel Polri yang berkualitas pada Portal Satu Data Polri.
- f. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data personel Polri.

D. PENTAHAPAN RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Pentahapan perubahan rencana strategis pada tahap kegiatan aktualisasi kepemimpinan disusun sebagai berikut :

Tabel 5. Pentahapan Jangka Pendek (2 bulan atau 60 hari)

NO	TUJUAN	KEGIATAN	OUTPUT	PELAKSANA	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Tersusunnya Revisi Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Personel Polri.	Pembentukan Pokja	Tim Pokja, Sprin	Tim Efektif	Minggu III September
		Penyusunan draft Revisi Perkap	Draft Revisi Perkap	Tim Efektif	Minggu III September
		Rapat pembahasan draft Revisi Perkap	Draft Revisi Perkap	Tim Efektif, Bagjiansis	Minggu I Oktober
		Rapat pembahasan lanjutan draft Revisi Perkap	Draft Revisi Perkap	Tim Efektif, Bagjiansis, Div TIK	Minggu II Oktober
		Pengajuan draft Revisi Perkap ke Biro Jianstra	Draft Persetujuan Proper	Tim Efektif	Minggu II Oktober
		Rapat harmonisasi awal	Undangan, Notulen	Tim Efektif, Bagjiansis, Div TIK, Divkum	Minggu III Oktober
		Rapat harmonisasi lanjutan	Undangan, Notulen	Tim Efektif, Bagjiansis, Div TIK, Divkum	Minggu IV Oktober
		Pengajuan pengesahan Revisi Perkap ke Divkum Polri	Laporan	Tim Efektif	Minggu I November
		Pembentukan Pokja	Tim Pokja, Sprin	Tim Efektif	Minggu III September
		Penyusunan draft Kep As SDM	Draft Kep As SDM	Tim Efektif	Minggu III September
2	Tersusunnya Keputusan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia tentang Tata Kelola Data Personel di lingkungan SSDM Polri.	Rapat pembahasan awal draft Kep As SDM	Draft Kep As SDM	Tim Efektif	Minggu I Oktober
		Rapat pembahasan lanjutan draft Kep As SDM	Draft Kep As SDM	Tim Efektif	Minggu II Oktober
		Pengajuan pengesahan Kep As SDM ke Bagrenmin	ND Pengantar	Tim Efektif	Minggu I Oktober
		Pengesahan Kep As SDM Kapolri	Kep As SDM	Tim Efektif	Minggu III Oktober
		Sosialisasi Kep As SDM Kapolri	Undangan, Notulen	Tim Efektif, Pembina Fungsi SDM pada Bag di lingkungan SSDM, operator SIPP level 2 dan level 3 pada Bag di lingkungan SSDM Polri	Minggu III Oktober
		Implementasi Kep As SDM Kapolri	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Anev	Tim Efektif, Bag di lingkungan SSDM Polri	Minggu III Oktober

Tabel 5. Pentahapan Jangka Pendek (2 bulan atau 60 hari)

NO	TUJUAN	KEGIATAN	OUTPUT	PELAKSANA	TARGET WAKTU PENYELESAIAN		
3	Terlaksananya program validasi data personel pada pada Sistem Informasi Personel Polri dengan pemanfaatan data NIK yang terintegrasi dengan data NRP.	Pemetaan data personel pada SIPP yang belum padan dengan data Dukcapil	Rekap data hasil pemadanan	Tim Efektif	Minggu I September		
		Pembentukan Pokja	Sprin	Tim Efektif	Minggu I September		
		Penyiapan konsep fitur validasi data	Konsep fitur baru	Tim Efektif	Minggu I September		
		Uji coba fitur validasi	Laporan hasil uji coba	Tim Efektif	Minggu II September		
		Penyusunan Teknis Validasi Data	Panduan Teknis Validasi	Tim Efektif	Minggu II September		
		Bimbingan Teknis Validasi Data kepada para administrator.	Laporan Kegiatan	Tim Efektif	Minggu II September		
		Pelaksanaan Validasi Data.	Laporan Kegiatan	Tim Efektif	Minggu III September sd. Minggu III Oktober		
		Anev Pelaksanaan Validasi Data.	Laporan Kegiatan	Tim Efektif	Minggu IV Oktober		
		4	Optimalisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal	Koordinasi optimalisasi bagipakai data personel untuk update data mutasi jabatan pada kepangkatan perwira menengah dan tinggi melalui aplikasi e-Mutjab	Laporan kegiatan	Tim Efektif, Bagmutjab	Minggu IV September
				Koordinasi optimalisasi bagipakai data personel untuk update data penugasan di luar struktur melalui aplikasi e-Gassus.	Laporan kegiatan	Tim Efektif, Baggassus	Minggu I Oktober
5	Optimalisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder eksternal	Koordinasi optimalisasi bagipakai data personel Polri dengan PT, BPJS dalam pengelolaan data kepesertaan BPJS Kesehatan.	Laporan kegiatan	Tim Efektif, PT, BPJS, Bagyanhak	Minggu I September sd. Minggu I Oktober		
		Koordinasi optimalisasi bagipakai data personel Polri dengan PT, Asabri dalam pengelolaan data kepesertaan Asabri.	Laporan kegiatan	Tim Efektif, PT, Asabri, Bagyanhak	Minggu I September sd. Minggu I Oktober		
		Koordinasi optimalisasi bagipakai data personel Polri dengan BP Tapera dalam pengelolaan data kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat.	Laporan kegiatan	Tim Efektif, BP Tapera, Bagyanhak	Minggu I Oktober sd. Minggu I November		

Tabel 6. Pentahapan Jangka Menengah (6 bulan sampai 1 tahun)

NO	TUJUAN	KEGIATAN	OUTPUT	PELAKSANA	TARGET WAKTU PENYELESAIAN		
1	Tersusunnya Keputusan Kapolri tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dalam Pengelolaan Data Personel.	Pembentukan Pokja	Tim Pokja, Sprin	Tim Efektif	Minggu II Januari		
		Penyusunan draft Kep Kapolri	Draft Kep Kapolri	Tim Efektif	Minggu II Februari		
		Rapat pembahasan awal draft Kep Kapolri	Draft Kep Kapolri	Tim Efektif	Minggu II Februari		
		Rapat pembahasan lanjutan draft Kep Kapolri	Draft Kep Kapolri	Tim Efektif	Minggu IV Februari		
		Pengajuan pengesahan Kep Kapolri	Draft Kep Kapolri	Tim Efektif	Minggu II Maret		
		Pengesahan Kep Kapolri	Kep Kapolri	Tim Efektif, Setum Polri	Minggu II April		
		Sosialisasi Kep Kapolri	Undangan, Laporan Kegiatan	Tim Efektif, Pembina Fungsi SDM Satker Mabes dan Polda, operator SIPP level 2 dan level 3 Satker Mabes dan Polda.	Minggu I Mei		
		Implementasi Kep Kapolri	Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Anev	Tim Efektif, Pembina Fungsi SDM Satker Mabes dan Polda, operator SIPP level 2 dan level 3 Satker Mabes dan Polda.	Minggu II April		
		2	Pengembangan kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal	Koordinasi pengembangan bagipakai data personel untuk update data penempatan pertama perwira pertama Polri melalui aplikasi e-Patma	Laporan kegiatan	Tim Efektif, Bagdiapers	Maret 2024
				Koordinasi pengembangan bagipakai data personel untuk update data penempatan pertama PNS Polri melalui aplikasi e-SIAP	Laporan kegiatan	Tim Efektif, Bagrimdik PNS	Juni 2024
3	Pengembangan kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal	Koordinasi pengembangan bagipakai data personel Polri dengan BP. Tapera dalam pengelolaan data kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat.	Laporan kegiatan	Tim Efektif, BP Tapera, Bagyanhak	September 2024		

Tabel 7. Pentahapan Jangka Panjang (1 tahun sampai 2 tahun)

NO	TUJUAN	KEGIATAN	OUTPUT	PELAKSANA	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Pengembangan fitur pada Sistem Informasi Personel Polri.	Pemetaan kebutuhan fitur tambahan yang dibutuhkan. Penentuan time line penambahan fitur sesuai prioritas. Pembuatan fitur baru. Uji coba fitur baru. Penggunaan fitur baru.	Daftar kebutuhan Time line Fitur Laporan Laporan	Tim Efektif Tim Efektif Tim Efektif Tim Efektif Tim Efektif	Desember 2024 Desember 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025
2	Tersedianya anggaran yang memadai pemeliharaan untuk Sistem Informasi Personel Polri.	Penyusunan RAB Pemeliharaan SIPP Tahun 2025 Pengajuan RAB Pemeliharaan SIPP Tahun 2025 Penyampaian telaahan staf tentang urgensi kebutuhan anggaran pemeliharaan SIPP	Draft RAB Surat Pengantar Telaahan Staf	Tim Efektif Tim Efektif Tim Efektif	Minggu IV September 2023 Minggu IV September 2023 Minggu IV September 2023
3	Terlaksananya Anev berkelanjutan dalam tata kelola integrasi data personel di lingkungan SSDM	Penetapan Anggaran Pemeliharaan SIPP Tahun 2025 Penyusunan rencana giat Anev tata kelola integrasi data personel di lingkungan SSDM Polri. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Anev	DIPA Tahun 2025 Rencana giat Sprin Konsep fitur baru	Srena Polri Tim Efektif Tim Efektif Tim Efektif	Minggu IV November 2024 November 2024 Februari 2025 April, Juli, September 2025

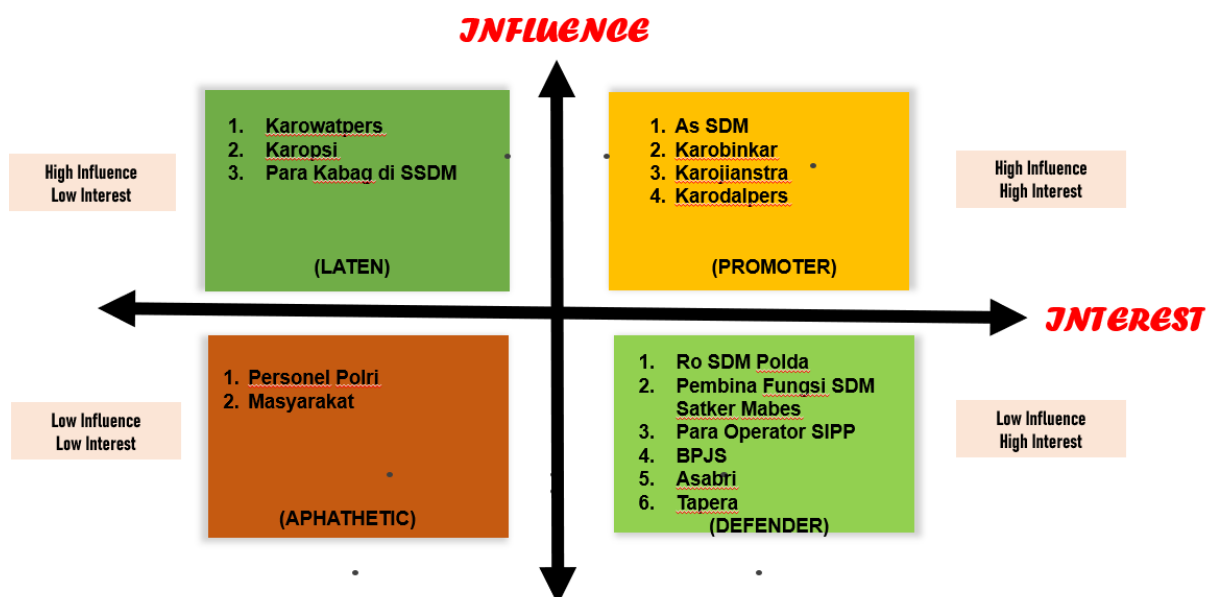
E. Identifikasi Stakeholder

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan serta memperoleh dampak dari dilaksanakannya proyek perubahan ini dikelompokkan menjadi stakeholder internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Stakeholder internal, yaitu:
 - a. As SDM Kapolri
 - b. Para Karo di SSDM Polri
 - c. Para Kabag di SSDM Polri
 - d. Pembina Fungsi SDM Satker Mabes dan Polda
 - e. Para operator SIPP
 - f. Personel Polri
2. Stakeholder eksternal, yaitu:
 - a. PT. BPJS
 - b. PT. Asabri
 - c. BP Tapera
 - d. Masyarakat

Para stakeholder tersebut kemudian dipetakan berdasarkan ketertarikan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) terhadap proyek perubahan sebagai berikut:

Gambar 2. Pemetaan Stakeholder





BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Implementasi proyek perubahan SIPP untuk Satu Data “Strategi Tata Kelola Data SDM Polri Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Satu Data Polri” dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, sejak pertengahan bulan September hingga pertengahan bulan November 2023. Pelaksanaan implementasi merujuk pada tujuan proyek perubahan rencana pentahapan (*milestones*) jangka pendek sebagaimana tertuang pada Rancangan Proyek Perubahan.

Capaian hasil implementasi proyek perubahan tersebut meliputi 3 (tiga) *output* jangka pendek, 2 (dua) *output* tambahan terkait dukungan mentor dan tim efektif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi proyek perubahan ini, 2 (dua) *output* tambahan pada target optimalisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal Polri, yaitu dengan Satker Puskeu Polri dan Korbinmas Korbinmas Baharkam Polri.

Berikut adalah rincian *output* capaian proyek perubahan:

3 (tiga) *output* jangka pendek :

- a. Tersusunnya Draft Revisi Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Personel Polri (SIPP).
- b. Tersusunnya Draft Keputusan As SDM Kapolri tentang Tata Kelola Integrasi Data Personel di Lingkungan SSDM Polri.
- c. Terlaksananya program validasi data personel pada pada Sistem Informasi Personel Polri dengan pemanfaatan data NIK yang terintegrasi dengan data NRP.
- d. Optimalisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal yaitu:
 - 1) Bagian Mutasi Jabatan, integrasi *update* data mutasi jabatan antara aplikasi Sismutjab dengan SIPP.
 - 2) Bagian Pangkat, integrasi *update* data kenaikan pangkat antara aplikasi E-UKP dengan SIPP.
- e. Optimalisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder eksternal, yaitu program pemadanan data kepesertaan anggota Polri pada BPJS Kesehatan dengan SIPP.

2 (dua) *output* tambahan yaitu:

- a. Pengembangan kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal Puskeu Polri yaitu pemadanan data NRP ganda pada aplikasi pengelola pembayaran tunjangan kinerja Puskeu Presisi dengan SIPP.
- b. Pengembangan kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder

internal Korbinmas Baharkam Polri, yaitu pemadanan data Bhabinkamtibmas pada aplikasi Binmas Online System (BOS) dengan SIPP

- c. Penyusunan Standar Data dan Meta Data Statistik Data Prioritas Satker SSDM Polri untuk Satu Data Polri.

1. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN.

a. Persetujuan Mentor

Proyek perubahan SIPP untuk Satu Data “Strategi Tata Kelola Data SDM Polri Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Satu Data Polri” ini telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Informasi Personel Polri selaku Mentor sebagaimana telah tertuang pada lembar Persetujuan Mentor (Lampiran 1)

b. Pembentukan Tim Efektif

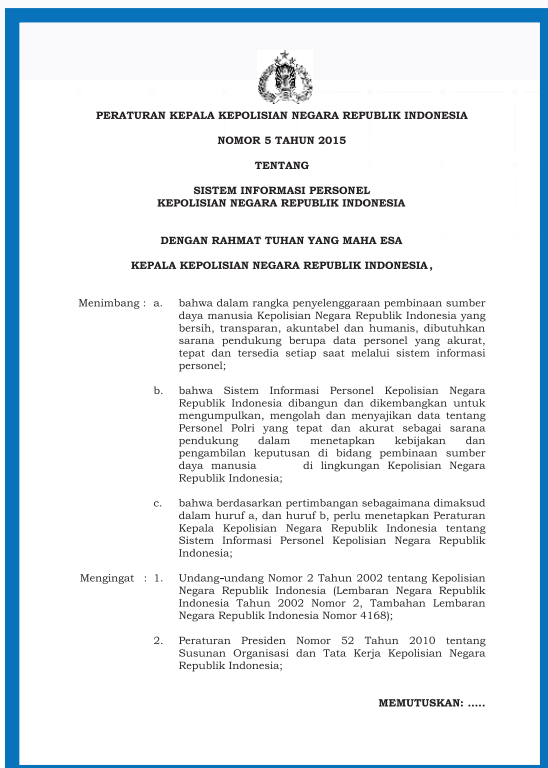
Untuk mendukung terwujudnya proyek perubahan ini maka dibentuk tim efektif. Pembentukan tim efektif dilakukan di ruang rapat Baginfopers Robinkar SSDM Polri pada tanggal 25 September 2023.

Tim efektif kemudian melaksanakan tugasnya berdasarkan Sprin Asisten Kapolri Bidang SDM tanggal 26 September tentang Penunjukan Tim Efektif Dalam Rangka Mendukung Proyek Perubahan Peserta PKN Tingkat II an. Afrinny Roesmawaty, S.Si., M.A.

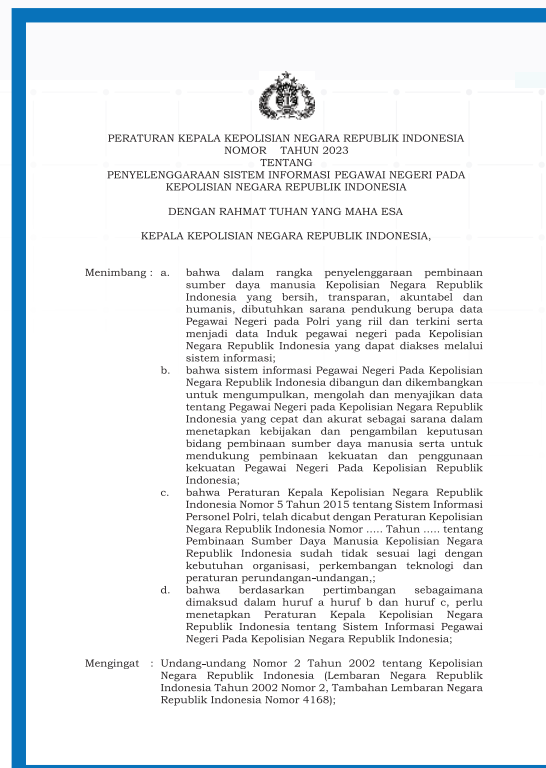
c. Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Personel Polri.

Target penyusunan revisi Perkap SIPP ini tetap diletakkan sebagai prioritas dengan mempertimbangkan urgensi kehadiran sebuah peraturan yang menjadi rujukan dalam mengelola dan mengoperasikan SIPP 2.0 yang merupakan *update version* dari *New SIPP* yang diatur oleh Perkap 5 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Personel Polri, yang dirasakan sudah tidak relevan lagi untuk SIPP 2.0 yang telah berkembang dengan sangat signifikan.

Rancangan Perkap yang dihasilkan (dapat dilihat pada bagian lampiran) berusaha memaksimalkan rancangan Perkap yang baru, dengan fokus materi terkait hal berikut: 1) pengaturan penanggung jawab pengelola SIPP di tingkat Satker Mabes hingga tingkat Polres, 2) pengaturan levelling hak akses operator dan kewenangannya, 3) pengaturan terkait integrasi dengan aplikasi lain, 4) pengelolaan server, keamanan dan kerahasiaan data dengan melibatkan Div TIK Polri.



Perkap 5 Tahun 2015 tentang SIPP



Draf revisi Perkap SIPP

Rapat pembahasan oleh tim efektif, dimotori oleh Subtim Regulasi, dilaksanakan sebanyak 4 kali di Ruang Rapat Baginfopers, sebagai berikut:

No.	Keterangan Rapat	Tanggal
1.	Rapat Penyusunan Rancangan Perkap SIPP 1	2 Oktober 2023
2.	Rapat Penyusunan Rancangan Perkap SIPP 2	4 Oktober 2023
3.	Rapat Penyusunan Rancangan Perkap SIPP 3	16 Oktober 2023
4.	Rapat Penyusunan Rancangan Perkap SIPP 4	18 Oktober 2023

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bagian Pengkajian Sistem di Biro Jianstra SSDM Polri dan Divisi Hukum Polri, untuk sementara waktu rancangan yang telah disusun belum dapat dilanjutkan pembahasan dan pengajuannya dikarenakan terkait pengelolaan SIPP, prioritas saat ini adalah pengajuan rancangan Peraturan Kepolisian tentang Pembinaan SDM Polri (Perpol Bin SDM) yang telah memasuki tahapan finalisasi, menunggu waktu untuk dapat dipaparkan kepada Wakapolri untuk memperoleh pengesahan

Sebab mengapa Perpol Bin SDM ini didahulukan karena merupakan konsideran pencabutan Perkap 5 Tahun 2015 ketika kemudian akan diajukan rancangan Perkap baru tentang SIPP.


PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul, berkualitas, berkeadilan, beretik, bermoral, berintegritas, bertanggung jawab, jujur, profesional, bebas dari intervensi politik, perlu dilakukan penataan terhadap sistem pembinaan sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa penataan terhadap sistem pembinaan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia bersifat menyeluruh, komprehensif, integratif dan sistematis dilakukan untuk memberikan kepastian pembinaan kejur, kesjahteraan, memenuhi kebutuhan organisasi dan menyelaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pejabat pembina kepegawaian melakukan pembinaan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

Draft Perpol tentang Pembinaan SDM Polri yang tengah diajukan

-46-

BAB VII SISTEM INFORMASI PERSONEL POLRI

Pasal 90

- (1) Sistem Informasi Personel Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dapat menerima, mengirim, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tentang SDM Polri yang akurat, berkualitas dan tepat waktu.
- (2) Penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online atau manual.

Pasal 91

- (1) Data dan informasi SDM Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dimuat dalam bentuk:
- a. data SDM Polri;
- b. data riwayat hidup, meliputi:
1. data riwayat hidup singkat; dan
 2. data riwayat hidup lengkap.
- (2) Data dan informasi tentang SDM Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pengawasan Pembinaan SDM Polri dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan internal; dan
- b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan SDM Polri untuk mendukung organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan terhadap Pembinaan SDM Polri maupun kegiatan SDM Polri oleh individu, kelompok atau institusi/pihak lain di luar organisasi Polri.
- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh:
- a. atasan dan penguaman fungsi SDM secara berjenjang dalam rangka pengawasan melekat;
- b. Inspektorat Pengawasan Umum dalam rangka audit kinerja;
- c. Profesi dan Penguaman Polri dalam rangka pengawasan dan pertanggungjawaban profesi.

-47-

- (5) individu, kelompok atau institusi/pihak lain di luar organisasi Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. kementerian/lembaga terkait;
- b. organisasi kemasyarakatan; dan
- c. masyarakat.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Semua ketentuan mengenai Pelatihan dasar yang sudah ada sebelum Peraturan Kepolisian ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Pelatihan prajabatan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 94

- Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Masa Dinas Surut bagi Bintara Polri Berjajah S1/D4/D3;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Masa Dinas Surut bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berjajah Sarjana/Diploma;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5711);
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1767); dan
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1523),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal tentang pencabutan Perkap 5 Tahun 2015

d. **Penyusunan Rancangan Keputusan Asisten Kapolri Bidang SDM tentang Tata Kelola Integrasi Data SDM pada SIPP di lingkungan SSDM Polri.**

Peraturan ini disusun untuk menyediakan rujukan yang akan menjadi pedoman bagian-bagian yang ada di seluruh Biro pada SSDM untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyedia data SDM sesuai tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi penanggung jawab untuk melakukan *update* data SDM secara otomatis berikut dengan dokumen pendukungnya.

Agar Kep ini nantinya dapat mengakomodir secara menyeluruh terhadap kebutuhan tata kelola integrasi data dengan, berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh tim efektif: 1) Menginventarisir aplikasi-aplikasi apa saja yang dimiliki oleh Bagian-Bagian yang ada di lingkungan SSDM, 2) Mempelajari proses bisnis pada tiap aplikasi, 3) Mempelajari HTCK SSDM Polri, sebagai tambahan informasi dalam penyusunan alur integrasi dan kebutuhan data pada tiap bagian.

Rapat pembahasan oleh tim efektif dilaksanakan sebanyak 3 kali di Ruang Rapat Baginfopers, sebagai berikut:

No.	Keterangan Rapat	Tanggal
1.	Rapat Penyusunan Rancangan Kep As SDM Kapolri tentang Tata Kelola Integrasi Data 1	10 Oktober 2023
2.	Rapat Penyusunan Rancangan Kep As SDM Kapolri tentang Tata Kelola Integrasi Data 2	11 Oktober 2023
3.	Rapat Penyusunan Rancangan Kep As SDM Kapolri tentang Tata Kelola Integrasi Data 3	23 Oktober 2023

Rancangan Kep As SDM telah disusun (dapat dilihat pada bagian lampiran), namun belum dapat dimaksimalkan pengesahannya pada tahapan jangka pendek ini dan akan dilanjutkan pada tahapan jangka menengah.

Dalam perkembangannya Kep As SDM akan dibuat lebih menyeluruh lagi, tidak hanya terfokus pada bagian-bagian yang telah memiliki aplikasi, namun akan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan semua bag yang ada, termasuk bagian yang belum memiliki aplikasi, untuk mengetahui kebutuhan tiap bag akan aplikasi atau sistem informasi yang dapat menunjang pekerjaan menjadi lebih efektif. Kedepan diharapkan tiap Bagian dapat terfasilitasi dengan aplikasi penunjang, baru kemudian diperkuat dengan peraturan berupa Kep As SDM Kapolri tentang tata kelola integrasi data yang lebih komprehensif.

Jadwal rapat pembahasan dengan Bagian-Bagian pada Robinkar dijadwalkan pada tanggal 27 Desember, Rodalpers dan Rowatpers pada tanggal 4 Desember 2023, kemudian Rojianstra dan Ropsi pada tanggal 5 Desember 2023.

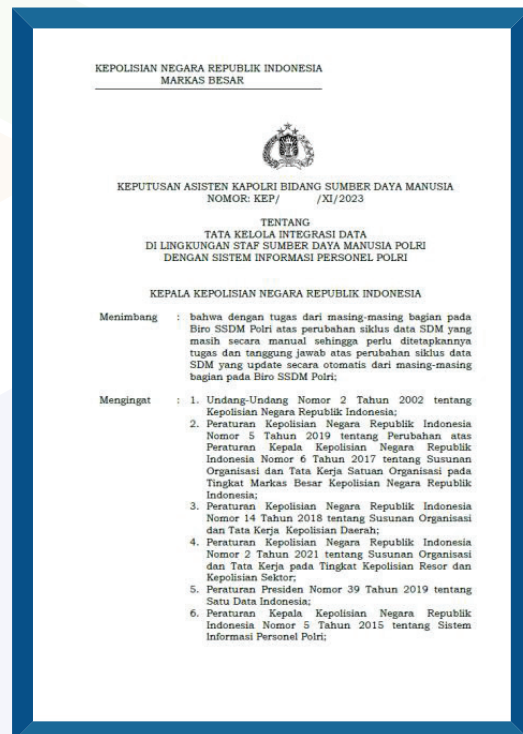
e. **Terlaksananya program validasi data personel pada pada Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) dengan pemanfaatan data NIK yang terintegrasi dengan data NRP.**

- 1) Penambahan fitur cek NIK pada SIPP
- 2) Pelaksanaan Program Validasi Data Personel Polri
- 3) Pelaksanaan Lomba Kelengkapan Data SIPP
- 4) Peningkatan validitas data NIK dan kelengkapan data personel lainnya pada SIPP.

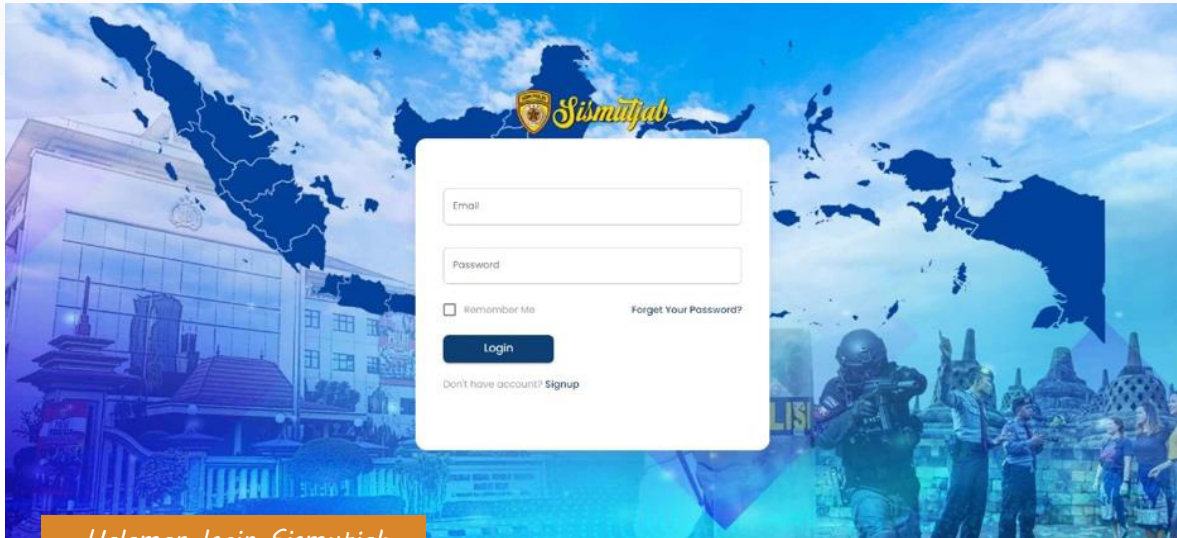
f. **Terlaksananya *update* data mutasi melalui integrasi aplikasi Sismutjab dan SIPP.**

Salah satu upaya untuk mendukung berjalannya proses update data secara efektif dan efisien salah satunya dilakukan dengan mendorong bagian-bagian yang merupakan produsen data untuk melakukan update data langsung pada SIPP secara otomatis melalui sistem sesuai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan. Pada tahapan jangka pendek ini ditargetkan terlaksananya kerjasama bagipakai data dengan Bagmutjab untuk proses update data mutasi jabatan. Dengan pengembangan integrasi aplikasi Sismutjab dengan SIPP, saat ini data mutasi jabatan untuk kepegangatan Pati dan Pamen Polri dapat secara otomatis masuk pada menu *Jabatan* personel bersangkutan berikut dokumen Kep Jabatan begitu Surat Telegram Kapolri tentang mutasi jabatan tersebut didistribusikan ke jajaran. Hal ini tentunya sangat efektif. Update data mutasi tidak perlu lagi dilakukan oleh para operator SIPP level 2 dan 3 di jajaran. Manfaat lain juga dirasakan oleh personel dimutasi. Yang bersangkutan dapat secara mandiri memperoleh soft copy Kep Mutasi Jabatan melalui akun SIPP masing-masing, sambil menunggu dokumen asli diterima.

Integrasi data mutasi saat ini baru dikembangkan untuk kepegangatan Pati dan Pamen saja. Koordinasi dan komunikasi akan dilakukan pada tahapan



Draft Kep As SDM Kapolri tentang Tata Kelola Integrasi Data



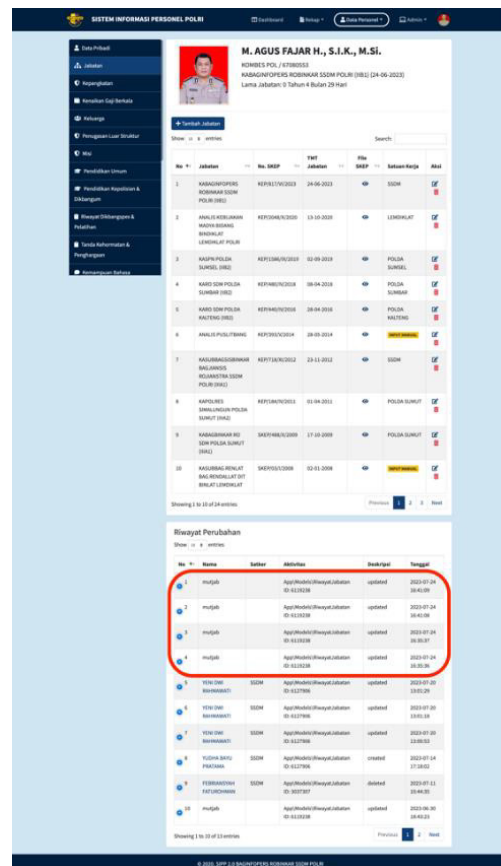
Halaman login Sismutjab

betrikutnya untuk pengembangan integrasi update data mutasi kepangkatan Pama, Bintara, Tamtama dan PNS.

Integrasi data mutasi jabatan saat ini baru dikembangkan untuk kepangkatan Pati dan Pamen saja. Koordinasi dan komunikasi akan dilakukan pada tahapan betrikutnya untuk pengembangan integrasi update data mutasi kepangkatan Pama, Bintara, Tamtama dan PNS.

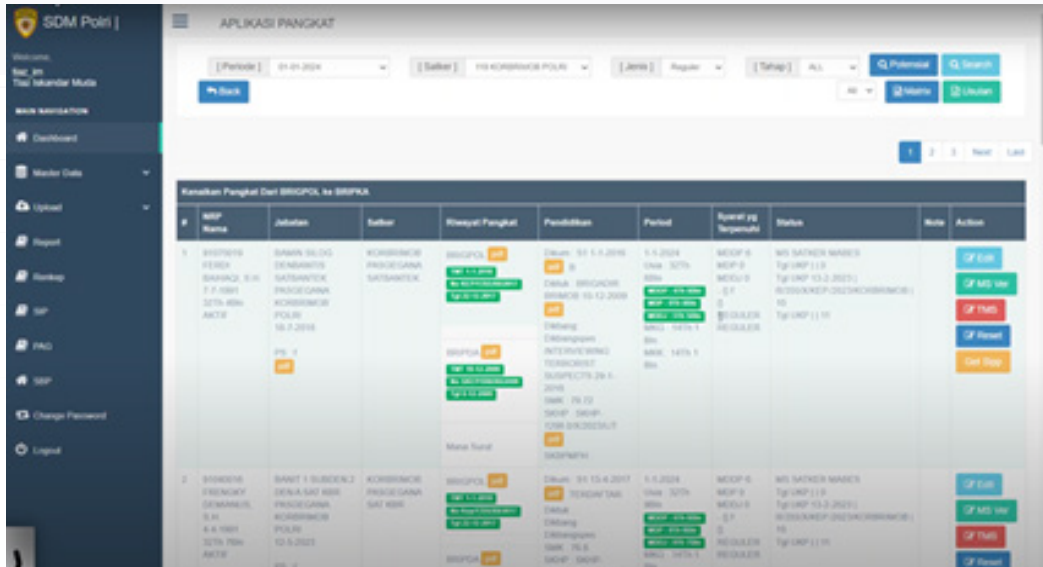
g. Terlaksananya update data mutasi jabatan melalui integrasi aplikasi E-UKP dan SIPP.

Capaianlaindalamtargetpenyelesaian kerjasama bagipakai data dengan internal Polri adalah dengan Bagpangkat. Pada Bagpangkat proses pengajuan usulan kenaikan pangkat (UKP) saat ini sudah dilakukan secara *paperless*. Personel pada Satker Mabes dan Polda dapat mengajukan UKP secara online melalui aplikasi e-UKP. Dengan pengembangan integrasi yang dilakukan, saat ini data kenaikan pangkat anggota Polri dapat secara otomatis ter update pada SIPP, berikut dengan dokumen Kep Kenaikan pangkat yang baru. Sama hal nya dengan prosedur mutasi, melalui optimalisasi integrasi ini, operator diajaran

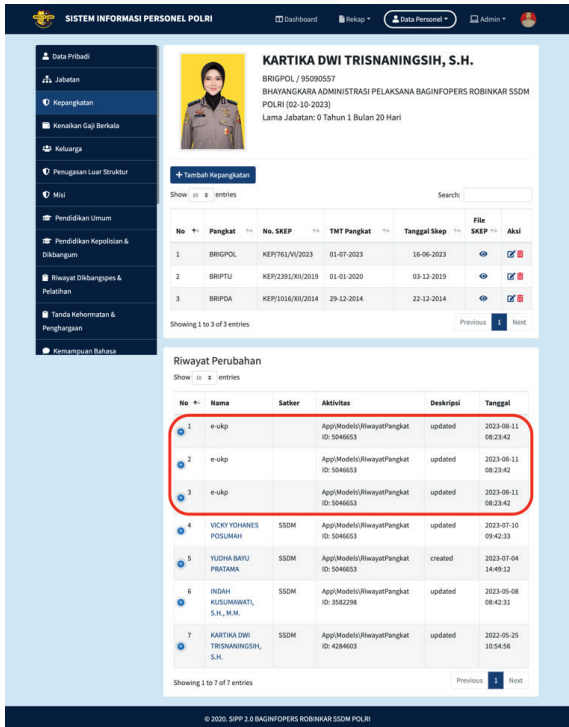


Log aplikasi SIPP mendapat update data jabatan dari Sismutjab

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



Halaman pengajuan kenaikan pangkat di aplikasi E-UKP



Log aplikasi SIPP mendapat update kenaikan pangkat dari aplikasi E-UKP

akan dimudahkan, karena tidak perlu lagi melakukan update data. Terlebih dalam tiap periodenya, jumlah anggota Polri yang naik pangkat jumlahnya cukup besar. Para personelpun dapat langsung menerima soft file Kep pangkat yang baru pada akun SIPP masing-masing.

Integrasi data kenaikan pangkat saat ini baru dikembangkan untuk anggota Polri saja, dari kepangkatan Pati hingga Tamtama. Koordinasi dan komunikasi akan dilakukan pada tahapan berikutnya untuk pengembangan integrasi update data mutasi kepangkatan PNS.

h. Tindak lanjut proses integrasi data PNS Polri SIASN-BKN dengan SIPP berupa kegiatan pemadanan disparitas data ASN Polri.

Hasil koordinasi dengan Bagmutjab dan Bagpangkat, dalam pengembangan integrasi updata data mutase jabatan dan kenaikan pangkat bagi PNS Polri, perlu dilakukan koordinasi lanjutan dengan BKN. Karena saat ini proses pengajuan usulan mutasi dan kenaikan pangkat telah dilakukan secara online melalui SIASN-BKN.

Hasil tindak lanjut dan koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN direkomendasikan untuk dilakukan pula penyelesaian disparitas data ASN Polri, untuk memadankan data rill ASN yang ada di SIASN-BKN dan SIPP. Termasuk diantaranya perlu dilakukan penyesuaian data Unit Organisasi di Polri, yang masih yang menjadi kendala utama dalam percepatan proses integrasi data.

Dengan menghadirkan narasumber dari BKN dan mengundang seluruh Subbag pengelola data PNS di SSDM Polri, yaitu Subbagpanglat PNSS, Subbagkordin PNS, Subbagmutasi PNS, Subbagrimtan PNS dan Subbagtandiklat PNS, dilakukan kegiatan percepatan penyelesaian Disparitas Data ASN Polri pada SIASN pada tanggal Pada tahapan berikutnya di awal tahun 2024 Baginfopers akan mengawali dengan diskusi dengan BKN untuk pengembangan Kerjasama Bagipakai data ASN Polri.

i. **Tindak lanjut proses pemadanan data kepesertaan anggota Polri pada BPJS Kesehatan.**

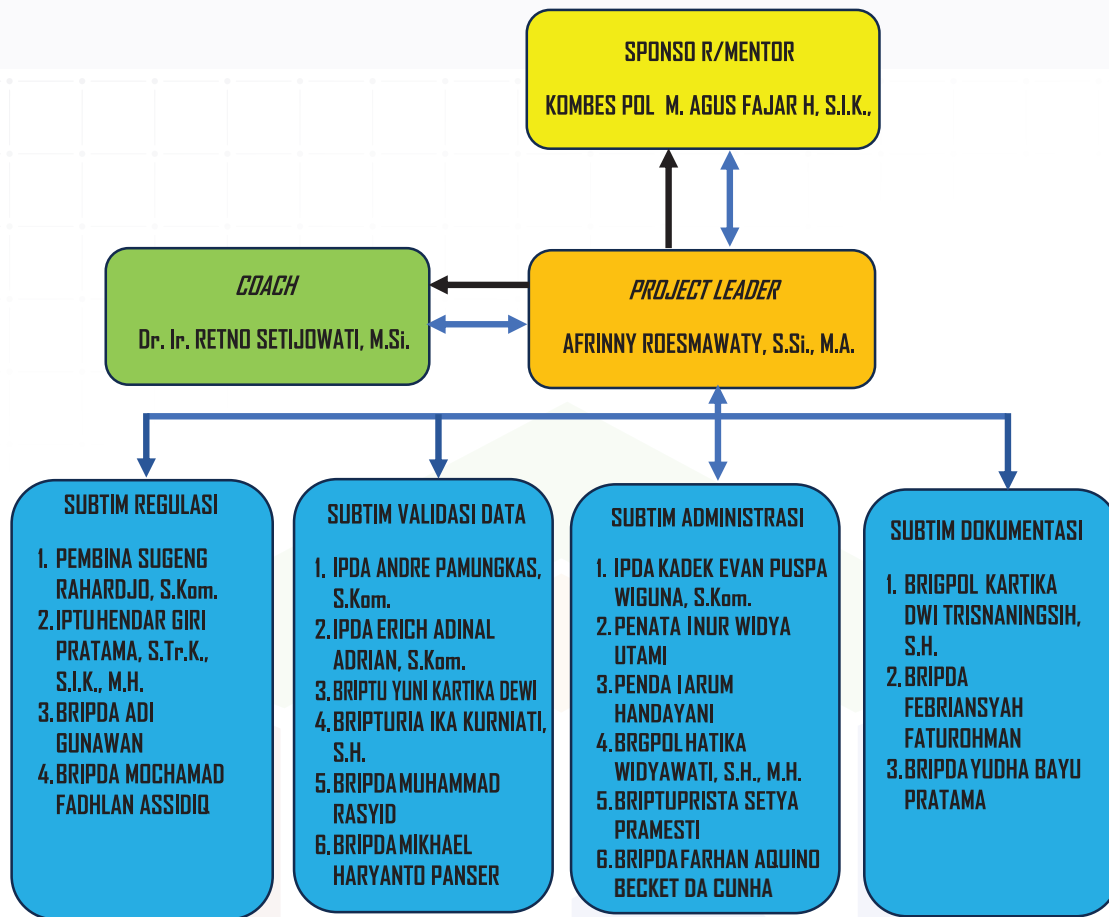
Rapat dilakukan untuk mencari solusi Bersama untuk mengatasi adanya perbedaan data antara data kepesertaan personel Polri pada database BPJS dengan data personel yang ada pada SIPP. Rapat dilaksanakan di Hotel Amaroosa, Jakarta Selatan. Rapat dihadiri pula oleh perwakilan dari Satker PusdokesPolri selakupengelola Faskes Pratama di Polri dan perwakilan dari Puskeu Polri selaku pengelola pembayaran gaji personel yang menjadi sumber dana pembayaran iuran BPJS Kesehatan tiap bulannya.



j. **Pengembangan kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal (Puskeu Polri).**

Kerjasama dikembangkan sebagai solusi untuk dapat menyegerakan penyelesaian adanya NRP anggota Polri yang masih terdata sebagai NRP ganda pada KPPN, sehingga menimbulkan kendala dalam pembayaran tunjangan kinerja dan juga pengurusan administrasi pengakhiran dinas

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



Tim Efektif Proyek Perubahan SIPP untuk Satu Data

ketika anggota tersebut telah memasuki Batas Usia Pensiun. Akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya untuk mengintegrasikan aplikasi Puskeu Presisi dengan SIPP.

k. Pengembangan kerjasama bagipakai data personel Polri dengan stakeholder internal (Korbinmas Baharkam Polri).

Kerjasama ini dikembangkan sebagai meningkatkan validitas data anggota Polri yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas pada seluruh Polsek jajaran. Pendataan para Bhabinkamtibmas yang telah diakomodir BOS (Binmas Online System) dibawah pengelolaan Korbinmas akan dikembangkan lagi dengan meningkatkan mekanisme dan fitur integrasi dengan SIPP. Sehingga diharapkan para Bhabinkamtibmas di seluruh jajaran dapat terdatakan dengan baik dan dapat lebih mudah untuk memperoleh layanannya.

i. Penyusunan Standar Data dan Meta Data Statistik Data Prioritas Satker SSDM Polri untuk Satu Data Polri

Bertanggungjawab sebagai produsen data bagi Satker SSDM Baginfopers perlu memahami dan menentukan Standar Data dan Meta Data Statistik bagi data yang diproduksi oleh SSDM dalam hal ini melalui SIPP. Dengan narasumber menghadirkan narasumber dan pendamping dari BPS pada tanggal 12 – 13 Oktober 2023 di Ruang Rapat Div TIK Polri telah dilakukan penyusunan Standar Data dan Meta Data untuk data prioritas Satker SSDM Polri.

2. KEPEMIMPINAN STRATEGIS

a. Pengelolaan Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan

1) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada proyek perubahan ini dilaksanakan pemberdayaan Tim Efektif yang berasal dari staf Bagan Informasi Personel Polri Biro Pembinaan Karier SSDM Polri.

STRUKTUR ORGANISASI TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan selama implementasi proyek perubahan yaitu: Command Center SSDM Polri, PC, laptop, printer, alat tulis kantor, jaringan intranet Mabes Polri, internet, ruang rapat, meja kursi dan handphone.

3) Teknologi

Teknologi yang digunakan berupa aplikasi pengelolaan data SDM Polri, Sistem Informasi Personel Polri (SIPP), portal ASN Berpijar – Future Skill dan aplikasi Zoom Meeting.

4) Anggaran

Pelaksanaan kegiatan selama implemenatasi proyek perubahan ini mendapat dukungan anggaran dari DIPA SSDM Polri untuk kegiatan Asistensi Sistem Informasi Personel Polri meliputi rapat koordinasi, pelaksanaan asistensi dan bimbingan teknis sebesar Rp. 434.902.000.

b. Pengelolaan Resiko Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan

Dalam rangka mengantisipasi kendala atau resiko yang dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan pelaksanaan proyek perubahan, dilakukan identifikasi potensi resiko dan upaya mitigasinya. Dari hasil identifikasi potensi resiko dan alternatif mitigasi resiko yang telah disampaikan pada rencana proyek perubahan berikut dijelaskan Langkah yang telah dilakukan selama implementasi sebagai berikut:

No.	Tahapan	Penjelasan
1.	Masalah	Proses pengajuan dan pengesahan Revisi Perkap tentang Sistem Informasi Personel Polri tidak dapat selesai tepat waktu selama 2 bulan masa implementasi proyek perubahan.
	Mitigasi Resiko	Melakukan koordinasi secara intens dengan Bagian Pengkajian Sistem Rojianstra, Divisi Hukum Polri dan Sekretariat Umum secara intens.
	Langkah yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan koordinasi dengan Bagjiansis Rojianstra SSDM Polri, dengan KP Dimas untuk mengajukan permohonan pembahasan draft Revisi Perkap SIPP yang telah disusun. ▪ Telah dilakukan koordinasi dengan Divkum Polri, melalui AKBP Elya berkoordinasi terkait progres pengajuan Perpol Bin SDM yang membuat pasal pencabutan Perkap SIPP yang lama.
2.	Masalah	Program validasi data tidak memperoleh respon yang baik dari para operator pelaksana
	Mitigasi Resiko	Melakukan Anev rutin dan segera menindaklanjuti langsung kepada Satker dan Pejabat Pembina Fungsinya.
	Langkah yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibentuk Tim Piket Help Desk harian pada Baginfopers untuk memantau progress update data harian program validasi data personel. ▪ Menyediakan fitur Rekap Data pada SIPP sehingga para operator bisa mengetahui list personel yang belum lengkap datanya. ▪ Tim Piket mengirimkan lprogress hasil capaian validasi data ke masing-masing email Satker dan Polda berikut list data personel dan dokuemn mana saja belum lengkap. ▪ SIPP yang diikuti seluruh Satker dan Polda untuk memacu jajaran melengkapi data. Pemenangnya kemudian akan diumumkan pada acara tahunan pada fungsi SDM Polri, Rapat Koordinasi Pembinaan SDM Polri.

3.	Masalah	Terdapat kendala teknis selama optimalisasi kerjasama bagipakai data melalui aplikasi Sismutjab dan E-UKP
	Mitigasi Resiko	Melakukan koordinasi dan Anev secara intens dengan Bagmutjab dan Bagpangkat
	Langkah yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk update data mutasi jabatan, 2 hari setelah Surat Telegram Kapolri tentang mutasi jabatan terbit, dilakukan pengecekan sampling terhadap beberapa nama personel yang dimutasi. ▪ Untuk update data kenaikan pangkat, melakukan pengecekan ulang pada sistem menjelang TMT kenaikan pangkat anggota Polri di tanggal 1 Januari dan 1 Juli ▪ Menghubungi Bagmutjab atau Bagpangkat jika ternyata data mutasi atau data kenaikan pangkat belum ter-update ▪ Baginfopers melakukan input data manual langsung ke database jika terjadi kendala pada sistem.
4.	Masalah	Proses pemadanan data tidak selesai sesuai <i>deadline</i> yang telah disepakakati atau ditentukan.
	Mitigasi Resiko	Melakukan Anev perkembangan capaian hasil pemadanan data secara intens.
	Langkah yang telah dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Anev capaian progress secara bertahap. ▪ Untuk pemadanan data dengan Asabri, Anev data dilakukan per triwulan. Rapat Anev Triwulan III Tahun 2023 dilakukan pada tanggal

3. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

a. Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasinya

Pada rancangan proyek perubahan telah dijelaskan hasil identifikasi stakeholder internal dan eksternal yang kemudian dipilah dan dipilih mana saja stakeholder yang menjadi pendukung utama dan kunci keberhasilan suatu organisasi. Berdasarkan tingkat pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*), terdapat empat kategori untuk pemetaan stakeholder, yakni Promoters, Latents, Apathetics dan Defender. Dari masing-masing kategorisasi stakeholder tersebut, selanjutnya diterapkan bentuk komunikasi yang telah disesuaikan bentuk komunikasinya dengan mempertimbangkan target output yang hendak dihasilkan.

Penerapan Strategi Komunikasi Pada Stakeholder

Kategori Stakeholder	Hasil Pemetaan Stakeholder	Bentuk Komunikasi	Output
Promoters	As SDM	Konsultasi, mohon arahan dan masukan	Dukungan Proper dalam upaya pengembangan Sistem Master Data Manajemen Enterprise
	Karobinkar	Konsultasi, mohon arahan dan masukan	Dukungan Proper dalam upaya pengembangan integrasi Satu Data SSDM
	Karojianstra	Konsultasi, mohon arahan dan masukan	Dukungan Proper dalam upaya pengembangan integrasi Satu Data SSDM
	Karodalpers	Konsultasi, mohon arahan dan masukan	Dukungan Proper dalam upaya pengembangan integrasi Satu Data SSDM
Latents	Karowatpers	Konsultasi, mohon arahan dan masukan	Dukungan Proper dalam upaya pengembangan integrasi Satu Data SSDM
	Karo Psi	Konsultasi, mohon arahan dan masukan	Dukungan Proper dalam upaya pengembangan integrasi Satu Data SSDM
	Kabag di SSDM	Koordinasi	Dukungan Proper dalam proses update data personel secara tersistem dan mendorong para operator untuk lebih pro aktif
Defenders	Ro SDM Polda	Koordinasi	Dukungan Proper dalam mengoptimalkan capaian program validasi data personel
	Pembina Fungsi SDM Satker Mabes	Koordinasi	Dukungan Proper dalam mengoptimalkan capaian program validasi data personel
	Operator SIPP	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Dukungan Proper dengan kinerja dalam upaya menyelesaikan target validasi data personel hingga lengkap 100%
	BPJS	Koordinasi dan Kerjasama	Dukungan program secara kolaboratif dalam rangka pepadanan data kepesertaan dan meningkatkan layanan akses data dengan pengembangan dashboard bersama.
	Asabri	Koordinasi dan Kerjasama	Dukungan program secara kolaboratif dalam rangka sinkronisasi data kepesertaan
Apathetic	Personel Polri	Penyampaian Jukrah	Dukungan berupa tindak lanjut untuk membantu proses validasi data dengan menyediakan data dan dokumen masih kurang atau salah.
	Masyarakat	Sharing Informasi	Diharapkan dapat memperoleh kemudahan untuk memperoleh data bidang kepolisian melalui portal Satu Data Polri pada tahapan jangka menengah dan panjang nanti.

b. Pemanfaatan Strategi Organisasi

Untuk tahapan *milestone* jangka pendek hasil penerapan strategi komunikasi terhadap para stakeholder telah berhasil merubah peta dukungan stakeholder sebagaimana sebagaimana nampak pada gambar berikut:

1) *Bagkhirdin Rowatpers SSDM Polri*

Bagian pengakhiran dinas tentunya merupakan bagian yang sangat penting untuk dikomunikasikan terkait proyek perubahan SIPP untuk Satu Data ini. Karena hingga saat ini Bagkhirdin belum memiliki aplikasi penunjang untuk melakukan update data khirdin, baik karena sebab pensiun, meninggal dunia, PTDH atau hal lainnya, secara otomatis. Saat ini update data dilakukan penginputan oleh para operator. Komunikasi yang dilakukan terkait proyek perubahan ini, mendorong Bagkhirdin kemudian menjadi salah satu Bag yang mendukung pelaksanaan proyek ini. Terutama terkait data pensiun PNS yang memerlukan tindak lanjut update data pada SIASN BKN. Disampaikan oleh Kasubbagkhirdin PNS, upaya inisiasi pengembangan kerjasama data dengan BKN pada tahapan jangka menengah dan panjang proyek ini, diharapkan dapat segera terwujud sehingga diharapkan di tahun 2024 tidak ditemukan lagi PNS Polri yang telah pensiun, namun masih terdata aktif pada BKN.

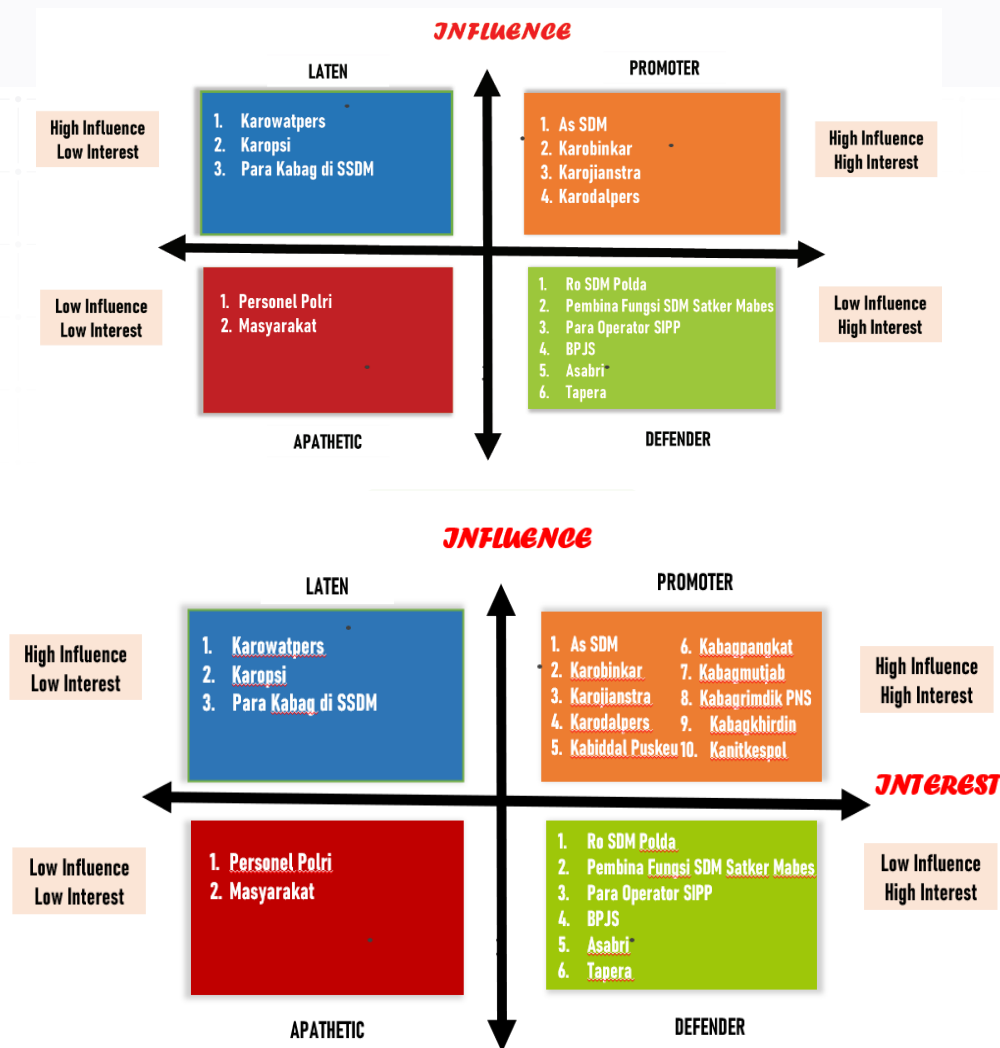
2) *Dari defenders ke promoters*

Puskeu Polri

Penyampaian proyek perubahan SIPP untuk Satu Data pada Puskeu Polri melalui Kabiddal telah mendorong Puskeu Polri untuk memberikan dukungan penuh, Karena disampaikan oleh Kabiddal kebermaanfaatan proyek ini sejalan dengan apa yang Tengah dilakukan Polri dalam menyediakan data belanja pegawai yang lebih baik lagi. Karena Puskeu tidak ingin adanya perbedaan data NRP ganda lagi pada sistem belanja pegawai di Polri. Baik pembayaran gaji ataupun tunjangan-tunjangan lainnya, sehingga berharap proyek ini dapat segera terwujud.

Pusdokkes Polri

Pusdokkes merupakan salah satu Satker pendukung utama sebagai penyedia data hasil pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan personel Polri per semester. Data inipun seyogyanya dapat tersedian dan ditampilkan pada SIPP. Sehingga untuk berbagai keperluan dinas yang memerlukan dokumen rikkes berkala, akan sangat terbantu jika dokumen tersebut dapat tersedia secara otomatis pada SIPP. Hasil koordinasi dan komunikasi yang telah dilakukan mendorong Pusdokkes



Polri memberikan dukungan penuh pada proyek perubahan ini. Pusdokkes pun nantinya akan berperan sentral sebagai penyedia data bagi program Indeks Profesionalitas Polri.

Susunan peta stakeholder **sebelum** diterapkannya strategi komunikasi milestone jangka pendek

c. Strategi Marketing

Dalam implementasi proyek perubahan SIPP untuk Satu Data ini dilakukan strategi Marketing Mix dengan menggunakan metode 4P-1C yakni **product**, **price**, **place**, **promotion**, dan **customer** yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Product

Strategi *product* difokuskan pada inovasi yang dihasilkan selama implementasi proyek perubahan yang meliputi:

- Rancangan Revisi Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Personel Polri.

- b. Rancangan Keputusan As SDM Kapolri tentang Tata Kelola Integrasi Data Personel di Lingkungan SSDM Polri.
- c. Program validasi data personel Polri pada Sistem Informasi Personel Polri.
- d. Realisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan *stakeholder* internal di lingkungan SSDM Polri yaitu dengan Bagmutjab dan Bagpangkat.
 - 1) Dengan Bagmutjab berupa integrasi *update* data mutasi jabatan kepangkatan Perwira Menengah dan Tinggi pada aplikasi SIPP melalui aplikasi Sismutjab.
 - 2) Dengan Bagpangkat berupa integrasi *update* data kenaikan pangkat anggota Polri dari kepangkatan Pati hingga Tamtama pada aplikasi SIPP melalui aplikasi e-UKP
- e. Kerjasama bagipakai data personel Polri dengan *stakeholder* eksternal SSDM Polri, yaitu dengan BPJS Kesehatan.

2) **Place**

Strategi *place* meliputi berbagai pengembangan kerjasama bagipakai data yang Tengah dikembangkan di satuan kerja SSDM Polri. Yang saat ini sudah berjalan adalah yang dillaksanakan oleh Baginfoopers, Bagmutjab dan Bagpangkat. Namun karena produk yang dihasilkan dalam bentuk digital, sangat memungkinkan untuk dilakukan dimanapun secara *online*

3) **Price**

Untuk strategi *price*, pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan dengan menggunakan dukungan anggaran dari DIPA SSDM Polri untuk kegiatan Asistensi Sistem Informasi Personel Polri sebesar meliputi rapat koordinasi, pelaksanaan asistensi dan bimbingan teknis sebesar Rp. 434.902.000.

4) **Promotion**

Strategi *promotion* dilakukan menggunakan SISDM, yang merupakan aplikasi yang wajib dimiliki oleh seluruh Pegawai Negeri Pada Polri sebagai salah satu penyebarluasan informasi yang bersifat internal dan resmi pada Polri menggunakan handphone.



Informasi pelaksanaan Program Validasi Data Personel yang diantaranya meliputi data NIK, karena bersifat internal telah disampaikan melalui SISDM pada tanggal 7 September 2023.

Untuk mendorong jajaran melaksanakan program validasi personel tersebut dengan baik SSDM melombakan capaian target update data SIPP dari para operator yaitu Lomba Kelengkapan SIPP yang



hasilnya dan pemenangnya diumumkan pada kegiatan Rakorbin PNS Polri yang dihadiri oleh Para Karo SDM dan Pejabat Pembina Fungsi SDM pada Mabes Polri. Satker dengan capaian terbaik dalam kelengkapan data SIPP dalam program validasi data personel ini diraih oleh Polda Jawa Timur.

5) **Costumer**

Costumer dari proyek perubahan ini adalah para stakeholder internal dan eksternal yaitu:

Stakeholder internal:

- a) Para Karo di SSDM
- b) Para Kabag di SSDM
- c) Satker dan Polda pengemban fungsi SDM
- d) Personel Polri
- e) Masyarakat

Stakeholder eksternal:

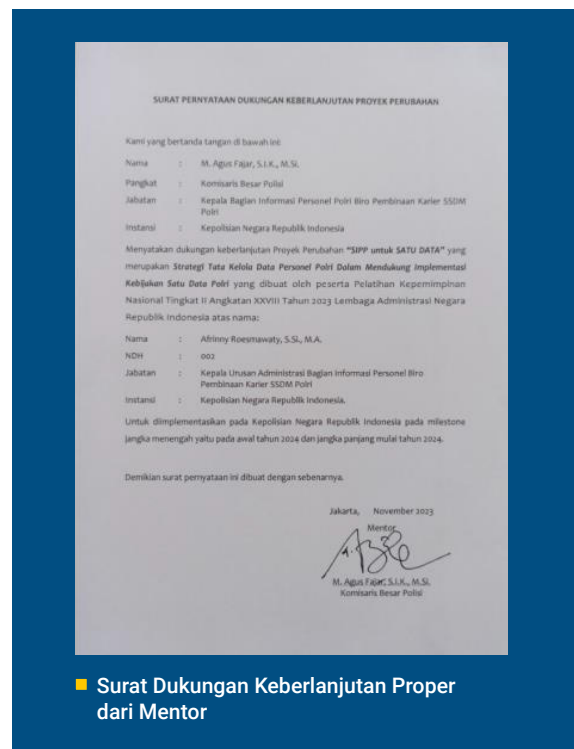
- a) PT. BPJS
- b) PT. Asabri
- c) BP Tapera

4. **KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN**

Implementasi proyek perubahan SIPP untuk Satu Data memerlukan waktu yang panjang dan berkelanjutan. Tidak cukup jika hanya dalam periode satu atau dua tahun penyelesaian. Untuk tetap menjaga kesinambungan dalam pelaksanaannya, maka penting untuk disusun sebuah *Blue Print* Pengembangan Sistem Informasi Personel Polri untuk kurun waktu 5 tahun kedepan tahun 2025 - 2029 sebagai pedoman regulasi, kebijakan, arah dan prioritas pengembangan sistem informasi SDM Polri.

Untuk tahun 2024 juga telah ditetapkan anggaran bagi Baginfopers melalui **Program Sistem Master Data Manajemen Enterprise pada Satker SSDM Polri** sebesar 40 Milyar rupiah, untuk mendukung pengembangan SIPP dalam bentuk program: a) *Master Data Management and Enterprise Database* melalui pengembangan integrasi antar aplikasi di SSDM Polri, b) *Human Capital Management Analytics Dashboard and Application* melalui pengembangan portal Satu Data SSDM, c) *E-Candidat* melalui pengembangan aplikasi dan dashboard E-Candidat, dan d) *Command Center Rejuvenation and Supporting Hardwares* melalui pengembangan Command Center SSDM Polri

Dukungan keberlanjutan proyek perubahan juga diperoleh dari Mentor yang sekaligus merupakan Kepala Bagian Informasi Personel Biro Pembinaan Karier SSDM Polri. Sebagai langkah awal di awal bulan Desember 2024 akan mulai dilakukan rapat yang menghadirkan seluruh Bagian di SSDM Polri untuk memetakan kebutuhan data, sistem atau aplikasi menuju dalam upaya mewujudkan **Satu Data SSDM**.



Tabel Berikut adalah gambaran tahapan pelaksanaan keberlanjutan proyek perubahan dalam bentuk *milestone* jangka menengah dan jangka panjang yang telah dilakukan penyesuaian, untuk mengakomodir dinamika yang terjadi pada implementasi proyek perubahan di *milestone* jangka pendek.

Milestone Jangka Menengah

No.	Tahapan kegiatan	Pelaksana	Des '23	Jun '24	Agt '24	Okt '24	Nov '24	Des '24
1.	Pemetaan kebutuhan data dan aplikasi pada Bagian-bagian di seluruh Biro pada SSDM Polri untuk keperluan menyusun <i>urgensi list</i> dan menentukan pengembangan aplikasi dan integrasi yang menjadi prioritas,	<i>Project Leader, Tim Efektif.</i>						
2.	Penyusunan Blue Print Sistem Informasi Personel Polri Tahun 2025 - 2029	<i>Project Leader, Tim Efektif, Vendor</i>						
3.	Optimalisasi kerjasama bagipakai data personel Polri dengan <i>stakeholder</i> eksternal dengan BPJS, Asabri dan Tapera	<i>Project Leader, Tim Efektif.</i>						
4.	Penerbitan Keputusan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia tentang Tata Kelola Data Personel di lingkungan SSDM Polri.	<i>Project Leader, Tim Efektif.</i>						
5.	Penerbitan Keputusan Kapolri tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Pengelolaan Data Personel.	<i>Project Leader, Tim Efektif.</i>						
6.	Pelaksanaan program Master Data Management and Enterprise Database melalui pengembangan integrasi antar aplikasi di SSDM Polri	<i>Project Leader, Tim Efektif, Vendor</i>						
7.	Pelaksanaan program Human Capital Management Analytics Dashboard and Application melalui pengembangan portal Satu Data SSDM	<i>Project Leader, Tim Efektif, Vendor</i>						
8.	Pelaksanaan program E-Candidat melalui pengembangan aplikasi dan dashboard E-Candidat.	<i>Project Leader, Tim Efektif, Vendor</i>						
9.	Pelaksanaan program Command Center Rejuvenation and Supporting Hardwares melalui pengembangan Command Center SSDM Polri	<i>Project Leader, Tim Efektif, Vendor</i>						
10.	Penerbitan Revisi Peraturan Kapolri tentang Sistem Informasi Personel Polri.	<i>Project Leader, Tim Efektif.</i>						

Milestone Jangka Panjang

No.	Tahapan kegiatan	Pelaksana	Nov '24	Apr '25	Jul '25	Sept '25	Nov '25	Des '24
1.	Pengembangan fitur pada Sistem Informasi Personel Polri.	<i>Project Leader, Tim Efektif.</i>						
3.	Terlaksananya Anev berkelanjutan dalam tata kelola integrasi data personel di lingkungan SSDM Polri.	<i>Project Leader, Tim Efektif..</i>						
2.	Tersedianya anggaran yang memadai pemeliharaan SIPP, Satu Data SSDM dan Command Center SSDM	<i>Project Leader, Tim Efektif.</i>						
3.	Terlaksananya Anev terhadap aplikasi E-Candidat	<i>Project Leader, Tim Efektif.</i>						

5. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Sebuah ide perubahan yang telah digagas dapat dikatakan berhasil ketika kemudian dapat terlaksana sesuai target capaian dan rancangan jadwal yang telah disusun. Hal terpenting adalah bagaimana kemudian perubahan itu dapat diinternalisasi oleh organisasi dan membawa dampak sesuai yang diharapkan.

Program SIPP untuk Satu ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari para stakeholder. Karena itu sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik pada SDM yang terlibat, antara lain para operator, administrator dan programmer SIPP, yang merupakan garda terdepan dalam pengelolaan data SDM pada SIPP.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM yang telah dilaksanakan dalam mendukung proyek perubahan ini adalah:

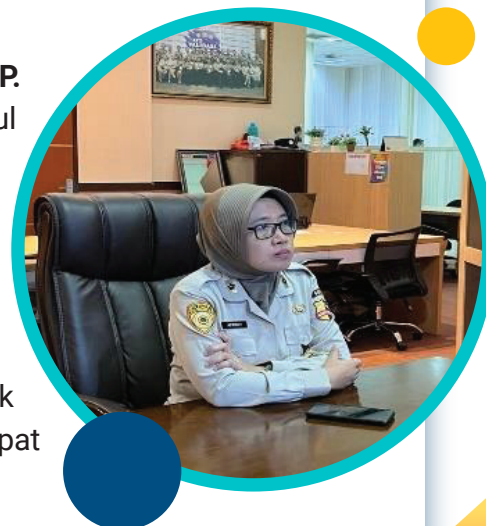
a. **Transfer Knowledge Database System aplikasi SIPP.**

Dilaksanakan tiap pekan sekali di hari Kamis pukul 09.00 WIB, dilakukan dengan menghadirkan vendor pengembang SIPP dan diikuti oleh 3 orang programmer Baginfopers dengan fasilitas *zoom meeting*.

Dalam kegiatan ini disampaikan berbagai kendala yang ditemui terkait pengelolaan SIPP untuk kemudian vendor menyampaikan solusi yang dapat diterapkan.

b. **Sosialisasi Tata Laksana Program Validasi Data**

Program validasi data dilakukan mulai tanggal 16 September 2023,





diperuntukkan bagi seluruh personel Polridengan koordinasi berjenjang. Baginfoopers selaku pelaksana menginformasikan program dan teknis pelaksanaannya melalui media Sistem Informasi SDM (SISDM) yang dapat diakses oleh seluruh personel melalui gadget masing-masing. Baginfoopers juga menyampaikan teknis validasi. Personel yang akan melakukan

update data akan difasilitasi oleh operator level 2 pada tiap Satker Mabes, Polda setempat. Tim help desk Baginfoopers yang piket setiap hari siap sedia membantu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan validasi.

c. Pembekalan Program Validasi Data Personel Bagi Administrator

Pembekalan ini bertujuan untuk menyiapkan para administrator sehingga dapat memberikan arahan kepada para operator di jajaran ketika ditemukan kendala, melakukan monitoring progress capaian hasil validasi harian dan membuat laporan kepada Katim.

d. Asistensi Peningkatan Kemampuan Bagi Operator Aplikasi SIPP Level 2 dan Level 3



Asistensi Peningkatan Kemampuan Bagi Operator Aplikasi SIPP Level 2 dan Level 3 yang telah dilakukan:



Asistensi dilakukan dengan mengunjungi Biro SDM Polda dan menghadirkan seluruh operator di jajaran Polda tersebut, baik di Satker Polda dan Polres untuk mengetahui tingkat pemahaman para operator dan melakukan pengecekan apakah pelaksanaan validasi data SIPP dijalankan dengan baik. Berikut adalah pelaksanaan



No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Asistensi validasi kelengkapan data SIPP Polda Malut	14 – 16 Juni 2023
2.	Asistensi validasi kelengkapan data SIPP Polda NTT	25 -27 Juli 2023
3.	Asistensi validasi kelengkapan data SIPP Polda Banten	19 – 21 Juni 2023
4.	Asistensi validasi kelengkapan data SIPP Polda Metro Jaya	21 Juni 2023
5.	Asistensi validasi kelengkapan data SIPP Polda	21 – 22 Agustus 2023
6.	Asistensi validasi kelengkapan data SIPP Polda Maluku	11 – 13 September 2023
7.	Asistensi validasi kelengkapan data SIPP Polda Kalteng	4 – 6 September 2023
8.	Asistensi validasi kelengkapan data SIPP Polda Sultra	6 – 8 September 2023



e. **Bimtek Peningkatan Kemampuan, Bagi Operator Aplikasi SIPP Level 1 SSDM Polri**

Operator level 1 SSDM memiliki hak akses kewenangan khusus untuk melakukan update data di internal SSDM maupun ke seluruh jajaran. Bimbingan teknis kepada mereka diperlukan untuk senantiasa menjaga mekanisme update data berjalan baik dan para operator tetap *up to date* terhadap perkembangan SIPP.

Pengembangan Kompetensi SDM yang Dilakukan

No	Stakeholder Terdampak	Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Cara Pengembangan Kompetensi	Hasil Pengembangan Kompetensi
1	Para programmer dalam Tim Efektif	Kemampuan melakukan query data secara mandiri pada SIPP untuk memenuhi kebutuhan pimpinan.	Transfer Knowledge Database System aplikasi SIPP	Meningkatnya kemampuan para programmer dalam melakukan query data secara mandiri tanpa bantuan dari vendor.
2	Para pejabat pengemban fungsi SDM di seluruh Satker Mabes Polri, Polda dan Polres	Pengetahuan cara melakukan validasi data personel pada SIPP untuk meningkat persentase kelengkapan data pada Satker masing-masing.	Sosialisasi Tata Laksana Program Validasi Data	Pemahaman akan tata laksana Program Validasi Data
3	Para Administrator SIPP	Tata cara monitoring pelaksanaan program validasi data,	Pembekalan Program Validasi Data Personel Bagi Administrator	Pemahaman akan Tata cara monitoring pelaksanaan program validasi data,
4	Operator Aplikasi SIPP Level 2 dan Level 3	Pengetahuan tentang tata cara update data personel yang benar dan cepat.	Asistensi Peningkatan Kemampuan Bagi Operator Aplikasi SIPP Level 2 dan Level 3	Pengetahuan tentang tata cara update data pkat.ara operator SIPP di jajaran meningkat.
5	Operator Aplikasi SIPP Level 1	Pengetahuan tentang tata cara update data personel yang benar dan cepat, melalui aplikasi pada Bag masing-masing ke SIPP	Bimbingan Teknis Mekanisme Bagipakai Data di Lingkungan SSDM Polri	Para operator level 1 paham akan tusunya dan dapat konsisten untuk mengupload data.

6. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada RPP, dari berbagai mata pelatihan pilihan, terdapat tiga mata pelatihan yang cukup signifikan dengan judul proyek perubahan yang tengah dilaksanakan yakni: (1) Menguasai Seni Berkomunikasi Dalam Hubungan Kerja; (2) Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan *Big Data*, dan (3) Mengaktifkan Sektor Digital di Sektor Pemerintahan.

Ketiga mata pelatihan ini diikuti penulis

pada program ASN Berpijar yang merupakan program peningkatan kapasitas aparat yang diselenggarakan oleh LAN RI bekerjasama dengan Pijar Foundation. Pelatihan diikuti secara *online*, dimana materi berupa modul dan video harus dipelajari oleh peserta terlebih dahulu dan diakhiri dengan kuis.

a. Menguasai Seni Berkomunikasi Dalam Hubungan Kerja

SSDM Polri berperan sebagai Pembina Fungsi SDM Polri di tingkat Pusat. Ruang lingkup pengelolaan,

koordinasi dan komunikasi pada *output* proyek perubahan ini akan menjangkau seluruh Satker pada Mabes Polri, Polda, dan Polres.

Oleh karena itu, mengikuti mata pelatihan ini sangat dirasakan manfaatnya dalam mendukung penerapan strategi marketing dan strategi komunikasi kepada para *stakeholder* yang telah dirumuskan. Dalam pelatihan ini disampaikan penekanan bagaimana agar kita dapat memaksimalkan capaian dari tujuan organisai dengan menguasai seni berkomunikasi.



b. Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan *Big Data*

Ketersediaan data personel Polri yang lengkap dan berkualitas pada SIPP, sebagai *Big Data* Polri di bidang SDM, yang sedang diupayakan diwujudkan melalui proyek perubahan ini, tentunya harus memberikan manfaat lebih untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas pula. Dengan mengikuti pelatihan penulis dapat lebih memahami bagaimana cara

meruskan sebuah kebijakan publik yang baik dengan memanfaatkan data pada SIPP.



c. Mengaktifkan Sektor Digital di Sektor Pemerintahan.

Proyek perubahan SIPP untuk Satu Data ini digagas dalam upaya untuk menciptakan bisnis proses dalam pengelolaan data SDM Polri yang berkualitas menjadi lebih efektif. Salah satunya dengan mengaktifkan sektor digital di lingkungan Polri dan Satker SSDM pada khususnya. Sehingga diharapkan hal ini mendorong terjadinya peralihan dari cara kerja manual menjadi tersistem. Oleh karena itu mata pelatihan menjadi penting untuk diambil untuk



memperoleh wawasan yang lebih luas melalui digital benchmarking bagaimana Estonia dapat menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan digital terdepan di dunia saat ini.

7. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Dalam rangka mengembangkan pengetahuan, potensi dan kapasitas diri, baik dalam pengelolaan manajemen diri pribadi maupun manajemen dalam berorganisasi, penulis mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya:

a. **Workshop Indeks Profesionalitas Personel Polri (IPP) untuk Tingkat Satker Mabes Polri** yang diselenggarakan oleh

Biro Pengkajian dan Strategi SSDM Polri pada tanggal 18 s.d. 19 Oktober di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Workshop ini menghadirkan narasumber dari bagian-bagian di Polri yang memiliki tugas dan fungsi mengelola penilaian yang termasuk dalam komponen IPP. Workshop IPP diselenggarakan untuk memberikan pemahaman bagi para pejabat pengelola SDM di lingkungan Polri tentang apakah IPP itu, bagaimana cara penghitungan nilainya dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pejabat bidang SDM untuk dapat mendorong SDM pada Satkernya untuk memperoleh capaian nilai IPP yang baik.



b. **Webinar ESQ**, dengan tema ASN Polri Berakhlak Sebagai Agen Perubahan Untuk Indonesia Emas, yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Korpri Polri pada tanggal 21 November 2023 Aula Bareskrim Polri, dengan menghadirkan narasumber Dr (HC) Ary Ginanjar Agustian. Webinar ini ditujukan untuk seluruh Dewan



Pengurus Korpri Satker Mabes Polri dan Polda beserta para anggotanya, yang dapat diikuti secara onsite dan online. Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kapasitas ASN Polri dengan akhlak yang lebih baik lagi.



c. **Rapat Koordinasi Akselerasi Penyediaan Data Kompetensi ASN Dalam Rangka Implementasi Manajemen Talenta Nasional**, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara RI, pada tanggal 20



Oktober 2023 melalui zoom meeting. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para perwakilan dari Biro Kepegawaian pada Instansi Tingkat Pusat, dalam hal ini penulis hadir sebagai salah satu perwakilan dari instansi Polri. Rakor ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang sama bagi pengelola SDM Intansi Pusat tentang pelaksanaan Manajemen Talenta Nasional, bagaimana mekanisme manajemen talenta SDM yang ada, dalam mencapai tujuan organisasi.

d. Rapat Koordinasi Pembinaan SDM dan PNS

Polri, yang diselenggarakan oleh SSDM Polri pada tanggal 7 s.d. 9 Oktober November 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Pejabat Pembina Fungsi SDM Satker Mabes, Karo SDM Polda, Dewan Pengurus Pusat Korpri Polri, dan Ketua Korpri Satker Mabes dan Polda. Penulis hadir sebagai perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat Korpri Polri. Rakor ini diselenggarakan bertujuan untuk:



- Melakukan Anev pelaksana an kebijakan bidang SDM Polri selama Tahun 2023.
- Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pejabat pengelola SDM Polri dengan menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan materi terkait pengelolaan manajemen SDM dan peningkatan kapasitas diri.
- Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pengurus Korpri Polri dengan menghadirkan narasumber dari BKN. KASN, Korpri Polri Pusat dan Kemenpan RB terkait isu dan penerapan manajemen digital dalam pengelolaan kepegawaian PNS Polri.

e. Seminar Talent DNA, yang diselenggarakan oleh ACT Consulting pada tanggal 23 November 2023 melalui zoom meeting. Seminar ini bertujuan:

- Bagaimana agar para individu sebagai seorang pemimpin mampu menghadapi persaingan sehat yang timbul dalam organisasi.
- bagaimana agar persaingan yang ada dalam organisasi tetap dapat menimbulkan dampak positif, seperti memacu anggota tim agar bekerja lebih semangat.
- Bagaimana caranya agar setiap anggota tim tetap dapat bersaing dengan keunikan yang mereka miliki. Persaingan sehat yang timbul dalam organisasi tentunya menimbulkan dampak positif, seperti memacu anggota tim agar bekerja lebih semangat. Namun, bagaimana caranya agar setiap anggota tim dapat bersaing dengan keunikan yang mereka miliki.





BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Proyek perubahan **SIPP untuk Satu Data** yang merupakan **Strategi Tata Kelola Data Personel Polri dalam mendukung Implementasi Kebijakan Satu Data Polri**, telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan manfaatnya baik oleh stakeholder internal maupun stakeholder eksternal.

Program ini mendorong penerapan komunikasi data yang lebih sistematis dan cepat pada berbagai bidang pekerjaan yang ada di lingkungan Polri, khususnya pada Satker SSDM, melalui pengembangan integrasi antara aplikasi yang selama ini telah ada dan digunakan oleh Biro dan Bagian di lingkungan SSDM dengan SIPP, sehingga proses *update* data tidak lagi dilakukan secara manual dengan mengandalkan input data dari para operator.

Dengan berbagai dinamika yang ada selama tahapan implementasi proyek perubahan, program SIPP untuk Satu Data ini kemudian akan diperluas untuk mewujudnya pengembangan aplikasi untuk Bagian yang belum memiliki. Program ini tentunya dapat menekan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data yang disebabkan oleh *human error*.

Dengan SIPP untuk Satu Data, melalui program kegiatan validasi data kelengkapan SIPP, validitas data utama personel Polri dapat ditingkatkan secara signifikan. Salah satunya yaitu data NIK, yang difasilitasi melalui penambahan fitur Cek data NIK pada SIPP, yang telah diintegrasikan dengan data Dukcapil. Validasi data NIK dilakukan untuk mengakomodir berbagai keperluan pelayanan hak-hak personel yang telah menerapkan penggunaan NIK sebagai *Key ID*.

Keberhasilan implementasi proyek perubahan SIPP untuk Satu Data ini tidak terlepas dari peran aktif *project leader* yang didukung oleh tim efektif dalam menjalin kerjasama, komunikasi dan kooordinasi dengan para stakeholder, baik internal maupun internal yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan implementasi proyek perubahan disampaikan rekomendasi berikut:

1. Program SIPP untuk Satu Data dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk keperluan pendataan dan pengelolaan data personel yang lebih luas lagi di lingkungan Satker SSDM Polri.
2. Program SIPP untuk Satu Data dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk keperluan pendataan dan pengelolaan data personel yang lebih luas lagi pada satuan kerja dan satuan wilayah di lingkungan instansi Polri.
3. Program SIPP untuk Satu Data juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mengoptimalkan keperluan pendataan dan pengelolaan data personel yang lebih luas lagi dengan melibatkan berbagai stakeholder eksternal melalui proses kerjasama yang baik.
4. Proses pengembangan aplikasi dan pengelolaan integrasi dalam mendukung mewujudkan ketersediaan data personel Polri yang berkualitas, harus tetap memperhatikan masalah kerahasiaan dan keamanan data.

3. LESSON LEARNT

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), merupakan sebuah proses pembelajaran bagi peserta sebagai pimpinan dan bagian unit kerja dari peserta. Proses ini sangat bermanfaat untuk membangun karakter pemimpin dan institusi yang berintegritas dan *agile* dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis.

Berbagai pengalaman yang dilakukan selama proses pendidikan dan pembuatan proyek perubahan telah mendorong dan mengkondisikan para peserta untuk sekaligus berlatih sebagai seorang pemimpin untuk melakukan praktek secara riil sekaligus melatih kemampuan untuk membuat suatu inovasi dan memimpin penerapannya dalam institusinya.

Dari pengalaman dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan diperoleh beberapa pembelajaran (*lesson learnt*) sebagai berikut:

1. Pemimpin harus senantiasa berinovasi dan membuat terobosan, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin. Hal ini diperlukan agar tim dan individu tetap termotivasi untuk bekerja secara optimal.
2. Pemimpin harus memiliki banyak ide dan mampu menyampaikan ide atau pemikiran secara efektif, sehingga dapat dipahami oleh tim baik secara individu maupun secara organisasi, serta mampu untuk mengkoordinir berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mewujudkan ide tersebut.

3. Pemimpin harus berani mengambil risiko namun terukur dengan mempertimbangkan berbagai potensi masalah berikut cara mengatasinya. Harus dapat memastikan bahwa risiko yang akan terjadi dapat diatasi atau diminimalisir dan berdampak kecil terhadap pencapaian tujuan.
4. Pemimpin harus dapat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien, melalui pengawasan yang efektif sehingga kesibukan tim dan individu yang mempunyai kegiatan atau tugas lebih dari satu, tetap dapat dikendalikan.
5. Pemimpin harus mampu mengembangkan networking dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal ini sangat penting dalam mencapai keberhasilan output dari tahapan proyek perubahan sehingga penerapan strategi komunikasi yang tepat sangat memegang peranan penting terutama untuk *output* yang sangat tergantung pada stakeholder eksternal yang berada jauh di luar jangkauan dari segi waktu dan tempat.
6. Pemimpin harus mampu mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki baik berupa sdm, sarana prasarana dan anggaran, serta mampu melakukan efisiensi biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
7. Pemimpin harus selalu mengevaluasi terhadap capaian target dari suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi kearah yang lebih baik.

